

STRATEGI PENANGGULANGAN RADIKALISME DI PERGURUAN TINGGI KABUPATEN BANYUMAS

Ulul Huda

Tenang Haryanto

Budiman Setyo Haryanto

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman

Email:

Alamat:



ABSTRAK

Isu krusial yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini adalah adanya Dosen Unsoed dan sejumlah Mahasiswa yang terprofokasi oleh faham radikalisme dan akhirnya bergabung dengan gerakan ISIS dan jaringan NII. Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah: Kesatu menemukan pola-pola penyebaran paham radikalisme di kalangan mahasiswa dan civitas akademika sehingga dapat diantisipasi dan dilakukan pencegahan. Kedua merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan timbulnya paham radikalisme di kalangan mahasiswa dan civitas akademika. Ketiga merumuskan peran strategis perguruan tinggi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan paham radikalisme di kalangan mahasiswa dan civitas akademika. Adapun tujuan jangka panjangnya adalah terbentuknya nuansa dan iklim Akademik Kampus di Kabupaten Banyumasyang sejuk, demokratis, dapat menghargai keberagaman, pluralitas, dan tumbuhnya sikap toleransi sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif dan analisis secara Content Analysis Method.

Kata Kunci: *Strategi, Penanggulangan, Radikalisme, Intoleransi*

A. LATAR DAN LINGKUP KAJIAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 angka 1 UU No 20 Tahun 2003). Adapun fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003). Dengan demikian pendidikan di Indonesia mempunyai dua fungsi, yaitu tercapainya kecerdasan lahiriah dan kecerdasan batiniah, yaitu selain menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, juga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta bertanggung jawab.

Sedangkan Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia (Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2012). Adapun tujuan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah:

- a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan

- d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Pasal 5 UU No 12 Tahun 2012).

Sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional, maka tujuan Pendidikan Tinggi juga mendidik Mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Selain itu para Mahasiswa mempunyai tugas sesuai Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Unsoed sebagai salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia mempunyai ciri khas dalam mendidik para Mahasiswa, yaitu sesuai dengan nama dan logo Unsoed, yang diimplementasikan dengan penanaman nilai juang dan karakter Jenderal Soedirman, yaitu: jujur, disiplin dan pantang menyerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dilakukan pendidikan karakter dengan nama mata kuliah Jati Diri Unsoed. Mata kuliah Jati Diri Unsoed merupakan salah satu dari mata kuliah pendidikan karakter, disamping mata kuliah Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan. Diharapkan para mahasiswa dan alumni Unsoed dan Cicitas Akademika Unsoed, menjadi manusia yang berkarakter jujur, disiplin, pantang menyerah, Agamis, Pancasilais dan Nasionalis.

Namun demikian tujuan pendidikan nasional secara umum dan tujuan pendidikan di Unsoed khususnya menghadapi tantangan berat dengan berkembangnya faham-faham radikal atau dapat disebut radikalisme di kalangan mahasiswa. Mahasiswa sebagai generasi muda yang masih rentan dalam pencarian jati diri, seringkali menjadi sasaran penyebaran faham radikalisme. Selain Mahasiswa, Tenaga Pendidik maupun Tenaga Kependidikan juga dapat terkena pengaruh faham dan gerakan radikalisme yang perlu diwaspadai. Dalam kamus bahasa Indonesia, radikalisme berasal dari dua kata yakni radikal dan isme. Radikal berarti akar, pangkal dan dasar. (KBBI, 1995: 808) Sedangkan isme berarti paham. Dengan demikian, maka radikal dapat diartikan paham yang mendasar. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; serta sikap ekstrim dalam aliran politik. (KBBI, 1995: 808)

Karakteristik orang maupun kelompok yang berpaham radikal umumnya dilukiskan sebagai paham yang intoleran, fanatik berlebihan, mengklaim diri paling benar, memiliki stigma buruk terhadap barat, mengusung khilafah Islamiyah serta syari'at Islam, menolak modernisasi, cenderung anarkis dalam memperjuangkan ideologinya, terkesan rigid dan tekstual dalam menafsirkan ayat maupun hadits.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, masalah radikalisme, ekstremisme, intoleransi, dan terorisme masih menarik perhatian publik. Bahkan, menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, diprediksi bahwa masalah tersebut masuk topik krusial sekaligus persoalan yang perlu dipikirkan solusinya sejak dini. Sebagaimana dimafhumi bahwa radikalisme, ekstremisme, dan terorisme sebetulnya bukan masalah baru. Namun, kini fenomenanya cukup mengkhawatirkan. Presiden Jokowi ikut berpesan kepada pimpinan perguruan tinggi di Indonesia untuk ikut mengantisipasi bahaya gerakan anti-Pancasila dan radikalisme negatif yang juga merebak di kalangan pelajar dan mahasiswa. (Koran Jakarta, edisi 18 Juli 2017. Hal: 2).

Mahasiswa Unsoed bahkan Dosen Unsoed juga tidak lepas dari sasaran paham radikalisme. Berdasar penelusuran intelejen Polres Purbalingga, seorang Dosen Farmasi di Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) Purwokerto pergi ke Suriah sekitar Juli 2014 dan bergabung dengan kelompok ISIS (<http://radar.banyumas.co.id>) Juga dalam Harian Republika diberitakan bahwa terdapat sedikitnya 30 mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, diduga masuk jaringan Negara Islam Indonesia (NII). Sejak tahun 2009, setidaknya ada 43 mahasiswa Unsoed yang telah masuk jaringan NII tetapi setelah dilakukan konseling, sebagian telah keluar dari jaringan tersebut. Saat sekarang, setidaknya ada 30 mahasiswa yang diduga kuat sudah masuk jaringan NII (<http://republika.co.id>).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga melaporkan hasil survei terkait radikalisme. Menurut data BNPT, sebanyak 39 persen mahasiswa di 15 provinsi di Indonesia yang menjadi responden terindikasi tertarik kepada paham radikal. Hasil survei tersebut menguatkan dugaan bahwa generasi muda adalah target penyebaran radikalisme dan kampus rentan menjadi tempat penyebarannya (Antara, Rabu, 26 Juli 2017). Selain itu Menristekdikti M. Nasir mengatakan telah melihat potensi radikalisme di kalangan mahasiswa pada saat ini. Hal tersebut mendesak pemerintah untuk perlu melakukan upaya pencegahan agar paham radikalisme tidak merebak luas. Menristek

Dikti Muhammad Nasir juga mengingatkan bahwa penyelenggara perguruan tinggi diharapkan berperan dalam mencegah tumbuhnya paham radikalisme (<https://news.detik.com>). Para peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan bahwa pengaruh paham dan ideologi radikal semakin merisaukan karena gerakan militan marak berkembang di kalangan kelompok strategis, terutama mahasiswa (Koran Jakarta, edisi 18 Juli 2017)

Berdasarkan kondisi dan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai strategi dan peran perguruan tinggi baik negeri dan swasta di Kabupaten Banyumas sebagai upaya mencegah timbulnya radikalisme di kalangan mahasiswa. Mahasiswa adalah generasi muda yang terdidik dan merupakan potensi dan harapan bangsa sebagai pelaku pembangunan di masa depan. Oleh karena itu perlu diarahkan dan dibina menjadi generasi muda yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi juga mempunyai kepribadian dan jiwa nasionalisme yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Timbulnya masalah radikalisme harus diantisipasi dengan pendekatan yang sistemik dan strategis melalui jalur dialog serta edukasi. Profesor Syamsul Arifin dalam buku *Studi Islam Kontemporer* mengatakan bahwa: Arus Radikalisme di Indonesia mencatat perlunya optimalisasi peran lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi, dalam mencegah dan menawarkan solusi alternatif gerakan paham radikalisme negatif atau deradikalisasi melalui jalur dialog dan edukasi (Jawa Pos, 27 Oktober 2017). Intinya, pencegahan dini dari praktik radikalisme negatif bisa dilakukan dengan penguatan kembali kegiatan edukatif yang kreatif, inovatif, produktif, dan kooperatif berbasis empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Penelitian ini selaras dengan visi Universitas Jenderal Soedirman sebagai *world class civic university* yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang relevan dengan pengembangan sumberdaya perdesaan yang berkelanjutan, serta penggalian dan pemanfaatan kearifan lokal. Dimana ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan mampu menjadi media *transfer of value* yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Dalam rangka memperkuat misi Universitas Jenderal Soedirman, yaitu “menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu serta alih teknologi

yang relevan dengan pengembangan sumberdaya perdesaan dan kearifan lokal” adalah langkah yang tepat untuk dilakukan dan di implementasikan pada masyarakat Banyumas. Dalam rangka menemukan penjelasan dan gejala atas fenomena gerakan radikalisme yang ada di Kabupaten Banyumas, untuk kemudian hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan rekomendasi dalam penentuan kebijakan mengenai pencegahan dan penanggulangan gerakan radikalisme. Pembahasan radikalisme dalam penelitian ini digunakan pengertian yang lebih luas, yaitu dalam perspektif politik, sosial, budaya, ekonomi dan agama.

B. TEORI DAN METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dipilihnya penelitian kualitatif ini didasarkan pada alasan bahwa hukum dalam penelitian ini dipandang sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam aksi-aksi dan interaksi warga masyarakat, dan apa yang ingin diperoleh serta dikaji penelitian ini adalah mengungkap dan mendapatkan makna yang mendalam dan rinci terhadap objek penelitian dan informan.

Adapun dengan pendekatan ini, terutama yang dipelajari dan diteliti adalah untuk mengetahui sejauh mana peran perguruan Tinggi di Kabupaten Banyumas dalam menanggulangi gerakan radikalisme di kalangan mahasiswa, terutama peran Universitas Jenderal Soedirman, IAIN Puroekerto, UMP, dan UNU Purwokoerto dalam menanggulangi agar mahasiswa terhidar dari gerakan ini, sehingga mampu memberikan antisipasi deradikalisme potensi gerakan radikalisme di Kabupaten Banyumas, dan pada akhirnya mampu memberikan kebijakan dalam penanganan radikalisme agama di Kabupaten Banyumas.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dipilihnya spesifikasi penelitian ini, mengingat dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial tanpa melakukan suatu hipotesa dan perhitungan secara statistik tentang fenomena gerakan radikalisme agama dan terorisme.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Wilayah Banyumas, dengan pertimbangan bahwa Banyumas merupakan daerah yang menjadi penghubung antara Jawa Tengah, Jawa Barat dan Yogyakarta, sehingga menjadi daerah yang rawan bagi berkembangnya paham radikalisme agama dan terorisme. Spesifikasi sasaran lokasi Penelitian ini sejauh mana peran perguruan Tinggi di Kabupaten Banumas dalam mencegah dan menanggulangi gerakan radikalisme, terutama peran Uninversitas Jenderal Soedirman, IAIN Puroekerto, UMP, dan UNU Purwokoerto.

3. Informan Penelitian dan Metode Penentuan Sampel (Informan)

Informan penelitian (narasumber) sebagai sampel penelitian merupakan orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk memilih sampel yang representative diperlukan teknik sampling, dengan cara Purposive Sampling. Purposive Sampling merupakan salah satu strategi pengambilan sampel non-acak, yaitu semua anggota atau objek penelitian tidak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

Sesuai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka Informan yang dipilih adalah:

- a. Level Pimpinan dan Dosen Unsoed Purwokerto
- b. Level Pimpinan dan Dosen IAIN Purwokerto
- c. Level Pimpinan dan Dosen UMP Purwokerto
- d. Level Pimpinan dan Dosen UNU Purwokerto
- e. Level Mahasiswa yang ada di Banyumas
- f. Aparat Kepolisian yang ada di Purwokerto

Pemilihan informan berikutnya dipilih metode Snowball Sampling, digunakan untuk mencari informan atau sampel yang berkelanjutan yang baru berhenti bila sudah tidak menemukan informasi.

4. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari pendapat langsung para informan, baik berupa uraian lisan atau tertulis.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

5. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer, di peroleh dengan:
 - a. Wawancara (interview), adapun dalam penelitian ini, teknik wawancara yang dipilih adalah dalam bentuk wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur.
 - b. Focus Group Discussion (FGD) dilakukan pada kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Kerokhanian dan organisasi massa berbasis agama untuk memperoleh data dengan fokus sesuai dengan tema yang ditentukan.
2. Data Sekunder diperoleh melalui melalui kajian kepustakaan (*library research*) yang didapat baik melalui penelusuran secara konvensional dan teknologi elektronik (situs internet).
3. Seminar Upaya Penanggulangan Radikalisme di Kabupaten Banyumas: Strategi Penanggulangan Gerakan Radikalisme di Pergutruan Tinggi Kabupaten Banyumas dengan mendatangkan para pakar atau pejabat kampus yang ada di Kabuten Banyumas.

6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, akan diolah dengan menggunakan reduksi data, display data dan kategorisasi data. Pada tahap Reduksi data, data dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting dicari tema dan polanya. Display data merupakan cara analisis data lapangan dengan membuat grafik atau bagan, agar dapat diperoleh gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian.

7. Metode Uji Data

Pengujian data atau uji kredibilitas data akan dilakukan dengan cara Triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan data yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dalam

metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

8. Metode Penyajian dan Analisis Data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel dan/ atau bagan. Penelitian ini menggunakan metode Content Analysis Method. Content analysis digunakan untuk mengambil makna yang terkandung dalam suatu data hasil dari penelitian, agar dapat menjelaskan makna-makna simbolik yang tersirat dalam bunyi setiap data dengan berpedoman pada tujuan utama penelitian, yang kemudian dikaitkan dengan suatu teori sehingga menjadi suatu rangkaian kata yang bermakna.

C. PEMBAHASAN

1. Radikal dan Radikalisme

Dalam kehidupan sehari-hari istilah radikal, hampir selalu diartikan sebagai hal yang negatif dan mencemaskan, walaupun secara akademis tidaklah selalu seperti itu. Kata radikal misalnya, berasal dari Bahasa Yunani, radiks, yang berarti akar. Artinya adalah bahwa segala sesuatu dicari dan dipahami hingga ke akarnya atau dasarnya. Namun peran media sering membuat istilah ini mengalami distorsi sedemikian rupa sehingga diartikan sebagai cara-cara, tindakan dan gerakan yang bersifat keras, kasar dan kejam.

Secara terminologi, dapat dikatakan bahwa radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka (Nasution, 1995, 124). Disamping istilah radikalisme, juga dikenal istilah fundamentalis yang memiliki makna yang *interpretable* (Abdul Havvie al-Kattani, 1999, 22) yang memang terkadang bermaksud untuk menunjuk kelompok pengembali (*revivalis*) dalam agama (Gibb, 1990, 52) dimana kedua terminologi tersebut mengacu kepada suatu paham dimana kekerasan adalah sebagai sebuah model dalam mencapai tujuan yang hendak diperoleh berdasarkan atas isme yang mereka anut.

Dalam Ensiklopedi Indonesia (Ikhtiar Baru – Van Hoeve, cet. 1984) diterangkan bahwa “radikalisme” adalah semua aliran politik, yang para pengikutnya menghendaki konsekuensi yang ekstrim, setidaknya

konsekuensi yang paling jauh dari pengejawantahan ideologi yang mereka anut. Dalam duadefinisi ini “radikalisme” adalah upaya perubahan dengan cara kekerasan, drastis dan ekstrim. Adapun dalam Kamus Ilmiah Populer karya Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry diterangkan bahwa “radikalisme” ialah paham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan.

Pengertian radikalisme sesungguhnya tidak terbatas dalam hubungannya dengan agama tertentu, Abdullah Zein mengatakan bahwa masalah radikalisme tidak tertuju pada suatu ajaran agama apapun, apalagi secara khusus ditujukan kepada Islam. Justru sebagian besar sangat terkait dengan dunia politik. Walaupun demikian mungkin saja gerakan radikal muncul sebagai akibat dari kekeliruan dalam memahami ajaran agama (<http://fisip.unsoed.ac.id>). Oleh karena itu kata radikalisme dapat didekati dari berbagai perspektif atau sudut pandang, yaitu: perspektif politik, sosiologi, budaya, ekonomi dan agama.

2. Radikalisme dalam perspektif politik

Dalam perspektif politik radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam kehidupan politik, radikal perubahan secara mendasar dan prinsip. Secara umum dan dalam ilmu politik maka radikalisme adalah suatu konsep yang berupaya untuk mengadakan perubahan kehidupan politik secara menyeluruh dan mendasar tanpa di perhitungkannya peraturan/ketentuan konstitusi politis dan sosial yang sedang berlaku, radikalisme sangat ekstrim dan fundamentalisme.

Radikalisme dalam perspektif politik, pada galibnya, adalah membicarakan negara (Azyumardi. 2000) atau pembicaraan mengenai hubungan antara penguasa dengan yang dikuasainya, yang oleh Hegel merupakan elemen pertama dalam ilmu politik. Namun sebenarnya dalam perspektif politik bukan negara itu yang terpenting, tetapi kekuasaan yang dimilikinya itulah yang menjadi perhatian utama, dan kekuasaan inilah yang dinilai merupakan sumber radikalisme. Oleh karena itu, dalam perspektif politik, radikalisme yang terjadi menempatkan faktor kekuasaan sebagai inti persoalannya, sehingga radikalisme juga sering dimaknai sebagai bentuk dan cara perebutan kekuasaan. Apalagi ketika berbicara kekuasaan dalam politik, maka konotasi yang sifatnya jelek, kotor, kerakusan, serta dominasi seakan sudah terkonstruksi, dan merupakan image yang melekat dari kedua konsep tersebut.

3. Radikalisme dalam perspektif sosial

Dalam perspektif sosiologi radikalisme ataupun kejahatan pada umumnya merupakan kondisi alamiah dari masyarakat (*crime is a natural part of society*) (Paul B Horton, 1991, 208). Dikatakan demikian, karena realitas sosiologi memperlihatkan radikalisme atau kejahatan pada umumnya, ditemukan pada hampir semua lapisan dan bentuk masyarakat, apakah masyarakat yang masih sederhana ataupun yang sudah kompleks struktur sosialnya. Dalam perspektif sosial dapat dikemukakan diantaranya dua teori sosial, yaitu teori fungsionalis (*functionalist theory*) dan teori konflik (*conflict theory*).

Emile Durkheim sebagai salah satu pemikir fungsionalis, memberikan sumbangan pemikirannya terhadap radikalisme (*violence*) adalah diintrodukirnya konsep anomie, yaitu suatu konsep sosiologi yang menjelaskan kondisi psikologi yang merasa asing (*estranged*) sebagai akibat tercabutnya atau hilangnya rasa kemanusiaan dalam ranah kehidupan (*uprooted*), dan ekonomi menurut Emile Durkheim adalah penyebab yang bisa menimbulkan kondisi anomie tersebut (James M. Herlin, 1990-163).

Teori konflik memandang bahwa kekuasaan dan ketakteraturan sosial (*social inequality*) merupakan salah satu karakteristik dari setiap masyarakat (James M. Henslin, 1990-211). Di dalam kekuasaan terdapat konsep wewenang dan posisi yang diasumsikan jika pendistribusian kekuasaan, dan wewenang terjadi secara tidak merata, maka wewenang dan posisi tersebut menjadi faktor utama terjadinya konflik sosial dalam masyarakat. Konsep kekuasaan dan wewenang ini juga yang menciptakan dan menempatkan masyarakat dalam posisi struktur atas dan masyarakat struktur bawah.

4. Radikalisme dalam perspektif budaya

Pembicaraan radikalisme dalam perspektif budaya sampai pada simpulan bahwa masyarakat, atau etnis tertentu memiliki budaya radikalisme (*Violence Culture*) dalam dinamika kehidupannya. Upaya pemahaman radikalisme dalam perspektif budaya sesungguhnya telah lama dilakukan, dan telah menjadi salah satu objek dalam antropologi budaya.

Pada awalnya perhatian para antropolog terhadap radikalisme ini berkaitan dengan sengketa yang berkepanjangan diantara kelompok, atau etnis tertentu. Wright melihat rentetan tindakan radikalisme yang menjadi ciri dari sengketa ini merupakan instrumental dalam menuntut balas atau

kompensasi akibat kerugian yang diderita, atau juga guna menyanjung nama seseorang, atau keluarga dari kelompok yang tersangkut dalam sengketa (T.O. Ihromi, 75). Sedangkan menurut Radcliffe Brown radikalisme merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dianut oleh kelompok bertikai, dan dalam kaitannya dengan kelompok bertikai, radikalisme dianggap sebagai kewajiban yang kemunculannya merupakan bentuk manifestasi dari "solidaritas kolektif", suatu istilah yang mengacu pada pendapat Durkheim. Hal yang hampir sama juga, pendapat Nadel yang melihat radikalisme sebagai bentuk kewajiban untuk membalas ketidakadilan. Bahkan, yang menariknya lagi menurut Radcliffe Brown, radikalisme yang terjadi pada kelompok masyarakat yang bertikai dibenarkan oleh pendapat umum, meskipun menurut Leopold Pospisil tidak begitu jelas pendapat umum yang mana, apakah pendapat para pihak yang bersengketa, atau pendapat umum diluar masyarakat yang bersengketa. Namun lebih lanjut menurut Leopold Pospisil setidaknya pendapat umum ini adalah pendapat para pihak yang bersengketa. (T.O. Ihromi, 75).

5. Radikalisme dalam perspektif ekonomi

Pembangunan sering diidentikan dengan upaya "state building dan akumulasi modal" (Mohtar Mas'oeed et.al, 2001-18). Pada tataran ini, maka dalam kaitannya dengan radikalisme yang muncul, pembangunan itu sendiri menimbulkan perubahan-perubahan pada masyarakat baik perubahan dilingkungan fisik (demokrasi, lingkungan alam dll), maupun perubahan lingkungan sosial berupa hancurnya pranata dan lembaga sosial, terjadinya konfigurasi pemilahan sosial yang berujung pada munculnya radikalisme kolektif.

6. Radikalisme dalam perspektif agama

Pembahasan radikalisme dalam perspektif agama kiranya lebih kompleks jika dibandingkan dengan pembicaraan radikalisme dalam perspektif lainnya. Hal ini dikarenakan, bahwa tidak ada satu ajaran agamapun yang kiranya memuat suatu perintah agar penganutnya untuk melakukan radikalisme. Jika ada yang mengajarkan hal yang demikian, maka keberadaan agama dinilai telah mengingkari dirinya yang menghendaki kedamaian dan kesucian baik lahir batin dan dalam kehidupan di dunia maupun akhirat.

Berbeda dengan bidang kehidupan lainnya, dalam agama terdapat berbagai ajaran, simbolisme, cerita/amsal, konsep, dogma, ritualitas serta idealitas sistem, dan struktur pribadi maupun sosial yang dikehendaknya, yang menjadikan agama menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia. Mulai dari dimensi alam atas dan alam bawah sadar manusia, dimensi imanensi dan transendental, dimensi psikis dan fisik manusia. Keseluruhan substansi agama tersebut bersifat universal, sedangkan jika menyangkut bagaimana simbol, konsep, ritualitas dan idealitas yang ada pada agama tersebut dipahami oleh pemeluknya, maka agama menjadi bersifat particular (Zumri Bestado Samsuar, 1999-34).

Pada sifatnya yang universal maka agama memperlihatkan dimensi Illahiyah, sedangkan pada yang partikular bisa merupakan cerminan dan refleksi budaya lokal dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika agama memiliki fungsi yang sakral dan ditempatkan sebagai suprastruktur dalam keseluruhan tatanan kehidupan masyarakat tersebut, dan menyentuh sisi eksistensialisme manusia itu sendiri. Dari kedudukannya inilah, agama dinilai memiliki fungsi manifes (*manifest functions*) yaitu fungsi yang disadari betul oleh para partisipan sebagai manifestasi objektif dari suatu sistem sosial, misalnya meningkatkan kehesivitas umat (Ukuwah), atau memiliki fungsi laten (*latent functions*) (Robert K. Merton, 1967-115) yaitu fungsi yang tidak dikehendaki secara sadar dari sistem sosial tersebut dalam memunculkan radikalisme, atau menurut Azyumardi Azra agama merupakan lahan empuk untuk menjadi crying banner dalam melakukan tindakan anarkis (radikalisme-Penulis), (Azyumardi Azra, 1999-11) yang juga sama-sama didasari pada pembacaan dan konstruksi tekstualitas yang ada dalam agama itu sendiri.

D. PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN GERAKAN RADIKALISME

Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi lembaga yang melahirkan para pemikir, peneliti, seorang yang ahli dalam bidang ilmunya, menguasai IPTEK, akan tetapi juga menjadi manusia yang berpandangan dan berwawasan luas, demokratis, mampu memecahkan permasalahan dan dapat mengikuti perkembangan jaman. Akan tetapi pada sisi lain, Kampus juga menjadi lingkungan yang menjanjikan bagi pengusung

paham radikal. Mereka membidik para mahasiswa yang secara psikologis masih dalam proses pencarian jati diri. Dalam banyak kasus, pegiat paham radikal membidik mahasiswa yang “polos”, artinya yang tidak memiliki latar belakang keagamaan kuat. Kepolosan mahasiswa ini dimanfaatkan oleh pengusung paham radikal dengan memberikan doktrinasi keagamaan yang monolitik, kaku, dan jauh dari kontekstualisasi. Pada proses inilah radikalisme ditanamkan dan disebarluaskan melalui sistem kaderisasi yang ketat dan cenderung tertutup.

Berangkat dari gambaran proses kaderisasi yang dilakukan oleh kelompok radikal keagamaan yang membidik mahasiswa “polos” sebagai generasi penerusnya dan dilakukan tertutup, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- a. Pertama, mahasiswa yang tidak memiliki latar belakang keagamaan yang kuat, justru merekalah yang memiliki semangat belajar keagamaan yang cukup tinggi. Ironisnya, semangat tersebut justru ditangkap oleh kelompok radikal, sehingga mahasiswa mudah terdoktrinasi dan terjebak dalam ajaran radikal.
- b. Kedua, pola tertutup dalam kaderisasi paham radikal menjadi titik penting proses doktrinasi paham radikal itu sendiri, dimana semakin eksklusif suatu perkaderan maka radikalisasi semakin tidak terbendung.

Berdasarkan uraian di atas, maka, upaya yang efektif untuk mencegah kampus dari radikalisasi adalah dengan melakukan strategi yang berlawanan dari dua kesimpulan penting di atas. Pertama, kampus harus memberikan fasilitas belajar keagamaan yang proporsional kepada mahasiswa, terutama untuk menampung mereka yang sesungguhnya memiliki semangat belajar agama cukup tinggi, sekalipun tidak memiliki latar belakang keagamaan yang kental. Sehingga mereka tidak belajar agama kepada kelompok radikal dan eksklusif yang berbahaya. Kedua, kampus secara berkala harus mengupayakan penyebaran ajaran keagamaan dengan suasana terbuka dan menekankan moderatisme. Selain mampu membendung radikalisasi dan mencegah bibit teroris, kedua upaya itu bisa menjadi strategi untuk membangun moralitas mahasiswa yang seimbang dengan keunggulannya secara akademik.

E. POLA-POLA PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME DI KALANGAN MAHASISWA DAN CIVITAS AKADEMIKA

Lingkungan Perguruan Tinggi dimanapun berada, sedang mengalami perubahan yang sangat cepat, secara global perubahan terlihat dalam bentuk berkembangnya masyarakat informasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam situasi yang demikian penguasaan ilmu pengetahuan oleh individu dan atau organisasi akan menjadi prasyarat dan modal dasar bagi upaya pengembangan diri dan organisasi dalam situasi yang makin kompetitif. Dalam masyarakat yang demikian setiap orang dan atau organisasi harus selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilan, jika ingin tetap hidup dan berkembang. Keadaan yang demikian menurut Prof. Sularso, Guru Besar ITB, disebabkan oleh cepatnya perubahan kebutuhan kompetensi perorangan maupun organisasi dalam dunia yang penuh perubahan dan persaingan.

Kondisi yang demikian merlukan respon proaktif dari seluruh lapisan masyarakat, terlebih-lebih lagi Perguruan Tinggi sebagai *center of excellence* jelas harus melakukan *repositioning* dalam konteks lingkungan eksternal melalui upaya *restructuring internal* yang terencana dengan baik (*well-planned*), dilaksanakan dengan baik (*well-actuated*), dan dievaluasi dengan baik secara berkesinambungan (*well evaluated/controlled*) dalam bingkai semangat *continous updating*.

Dari sudut pandang filosofis, Perkembangan Iptek yang sangat cepat, telah makin mengokohkan faham pemikiran Pragmatisme-utilitarianisme, dimana segala sesuatu cenderung dilihat dari sudut manfaat dan kegunaan praktis bagi kehidupan, keadaan ini telah mengakibatkan pemahaman dan orientasi pendidikan mengalami pragmatisasi, dimana sebelumnya pendidikan lebih dilihat secara ideal sebagai upaya untuk mendewasakan manusia melalui *tranmission of culture, value, and Norm* tanpa atau kurang memperhatikan dampak praktisnya atau lebih khusus dampak ekonomi bagi kehidupan masyarakat.

Keadaan yang demikian menjadikan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan/lembaga pendidikan termasuk Perguruan Tinggi mengalami pergeseran dari tuntutan yang sifatnya idealis ke arah tuntutan yang lebih praktis-pragmatis. Namun demikian nampaknya akan sangat bijak apabila pergeseran tersebut dilihat sebagai gerak bandul dengan dua ujung, dimana

yang satu sama sekali tidak menafikan yang lain, idealisme tidak dianggap sebagai pengekang pragmatisme, dan pragmatisme tidak dianggap akan menghapus pemahaman ideal tentang pendidikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dimensi ekonomi dewasa ini telah mendominasi tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan, lembaga pendidikan yang lulusannya mudah mendapat pekerjaan sangat diminati, hal ini bukan sesuatu yang salah bahkan sangat rasional, namun Lembaga pendidikan perlu mensikapinya dengan tepat, sebab pertimbangan masyarakat bertumpu pada dimensi sekarang dan kekinian dengan lingkup parsial, sedangkan Lembaga pendidikan mesti mempertimbangkan juga dimensi kenantian sehingga lebih bersifat holistik.

Untuk mengantisipasi dan merespon hal tersebut di atas, diperlukan upaya-upaya untuk memampukan Perguruan Tinggi menjadi pelopor dalam pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia yang terintegrasi guna memenuhi (1) kebutuhan warga masyarakat yang berorientasi ideal atas pendidikan, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya spirit akademik yang dinamis, serta dapat menjadi wahana sosialisasi nilai-nilai, norma, dan sikap mandiri, dan (2) kebutuhan masyarakat yang berorientasi pragmatis melalui kesiapan mendidik manusia yang dapat terserap oleh dunia usaha sesuai spesifikasinya masing-masing.

Disamping hal-hal yang diuraikan di atas, pendidikan di Perguruan Tinggi juga mengalami distorsi dengan berkembangnya paham dan pemikiran radikalisme, khususnya radikalisme agama. Hal ini tidak dapat dipandang sebelah mata, karena telah banyak kasus-kasus yang beredar di media massa tentang berkembangnya paham dan pemikiran radikalisme di kalangan mahasiswa dan civitas akademika. Sebab apabila hal ini tidak dicegah dan dilakukan upaya penyadaran kepada para mahasiswa dan civitas akademika tentang ancaman dan bahaya laten berkembangnya paham dan pemikiran radikal ini, akan menghambat terwujudnya tujuan pendidikan tinggi dan menjadi ancaman bagi stabilitas nasional, karena dapat berimplikasi meruntuhkan kesatuan dan persatuan sebagai bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Radikalisme adalah

Faham radikalisme tidak hanya masuk di kalangan mahasiswa, akan tetapi juga civitas akademika, diantaranya para Dosen di Perguruan Tinggi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pasca peristiwa pengeboman bunuh diri di Surabaya (13-14 Mei 2018), meluas pembicaraan di kalangan publik tentang meningkatnya atau bertahannya paham radikal di kampus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) khususnya. Pembicaraan dan perdebatan ini berawal dari adanya pernyataan yang beredar luas dalam media sosial dari beberapa dosen - termasuk di antaranya professor - yang seolah-oleh merestui aksi bom bunuh diri. Dalam pernyataan di media sosial itu, mereka menganggap pengeboman bunuh diri sebagai rekayasa Polri dan pemerintah. Menurut mereka, bom bunuh diri Surabaya bertujuan: pertama, untuk menyudutkan 'umat Islam; kedua, guna mendapatkan peningkatan anggaran pemberantasan terorisme; dan ketiga, sebagai pengalihan isu upaya penggantian kepemimpinan nasional dalam Pilpres 2019. Selain itu, juga ada kalangan dosen dan profesor PTN yang mendukung atau memberikan justifikasi pada pemahaman dan praksis yang ingin membentuk dakwah Islamiyah atau khilafah. Pemikiran dan praksis ini pada saat yang sama, baik secara langsung maupun by implication menolak NKRI dan Pancasila.

Sebelumnya pada tanggal (28/4/2018), Budi Gunawan, kepala BIN memberikan pernyataan, adanya tiga PTN sebagai tempat penyebaran paham radikal. Dia tidak menyebut eksplisit nama ketiga PTN tersebut di antara 20 PT di 15 provinsi yang menjadi sasaran survei BIN. Budi Gunawan mengungkapkan lebih jauh, 39 persen mahasiswa dari berbagai PT di Indonesia telah terpapar paham radikal. Dari pernyataan Budi Gunawan, kata 'terpapar' tampaknya berarti sekaligus mengikuti paham radikal. Selanjutnya, menurut dia, 24 persen mahasiswa dan 23,3 persen siswa SMA setuju dengan 'jihad' untuk menegakkan dawlah Islamiyah atau khilafah.

Keterangan lebih lanjut diberikan Hamli, direktur Pencegahan BNPT dalam seminar tentang radikalisme yang diselenggarakan *Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (25/5/18). Menurut Hamli, hampir seluruh PTN dan PTS telah terpapar pada paham dan praksis radikalisme. Malah dia menyebut nama tujuh PTN yang nyata-nyata disusupi paham radikal. Hamli mengungkapkan, bagian PTN dan PTS yang

paling rentan tersusupi paham radikal adalah prodi eksakta dan kedokteran. Dalam konteks terakhir ini, adanya fakultas dan prodi eksakta di lingkungan UIN, IAIN, dan STAIN juga memberi potensi cukup besar bagi infiltrasi dan penyebaran paham radikal.

Menurut Hamli, mengapa prodi-prodi semacam itu lebih rentan? Hal ini terkait dengan watak ilmu eksakta yang pada dasarnya memberikan perspektif 'hitam-putih'. Perspektif ini juga memengaruhi cara pandang dalam melihat agama—yang kemudian juga dilihat secara hitam-putih. Padahal, agama juga merupakan realitas dan gejala historis sosiologis; memunculkan fenomena 'abu-abu' dalam ekspresi keagamaan.

Berbagai penelitian lebih akademik dan ilmiah yang dilakukan lembaga penelitian kampus semacam PPIM dan CSRC UIN Jakarta atau independen, seperti Maarif Institut atau Wahid Foundation, dalam beberapa tahun sebelumnya telah mengungkapkan gejala penyebaran radikalisme di lingkungan PTN atau PTS. Dalam penelitian akhir 2017 lalu, PPIM menyebut gejala ini sebagai 'api dalam sekam'. Juga terungkap dalam berbagai penelitian itu, peningkatan gejala radikalisme terjadi tidak hanya di kalangan mahasiswa, tetapi juga dosen. Tidak terlalu aneh, jika mahasiswa yang pengalaman intelektualnya lebih terbatas dapat lebih mudah terpengaruh dan terekrut ke dalam pemikiran radikal (Republika.co.id).

Dalam Harian Tempo tanggal 4 Juni 2018 disebutkan bahwa: Ketua Tim Evaluasi Kinerja Akademik Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Supriadi Rustad menilai institusi pendidikan memiliki peluang terpapar radikalisme. "Kali ini, ada fakta bahwa kampus terpapar radikalisme. Saya kira sama dengan institusi lain, kampus bukan tempat yang steril sempurna," ujar Supriadi melalui pesan pendek. Pernyataan Supriadi itu bukan tanpa sebab. Detasemen Khusus 88 Antiteror menangkap tiga terduga teroris di Universitas Riau pada 2 Juni 2018. Polisi pun melakukan penggeledahan. Hasilnya, polisi menemukan dua bom pipa yang siap diledakkan. Ketiganya menasar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Riau dan DPR untuk diledakkan.

Pernyataan Supriadi memperkuat hasil penelitian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengenai paparan radikalisme di lingkungan kampus. BNPT menemukan paparan radikalisme di perguruan tinggi di Indonesia sudah terjadi sejak 30 tahun lalu. "Sekarang semua kampus

di Jawa sudah kena,” kata Direktur Pencegahan BNPT Brigadir Jenderal Hamli, seperti dimuat dalam majalah Tempo edisi 27 Mei-2 Juli 2018.

Penelitian BNPT juga memperkuat temuan lembaga penelitian lain yang menunjukkan tingginya paparan radikalisme di tingkat mahasiswa. Misalnya, penelitian Alvara Research Center pada Oktober 2017 menyebutkan 23,5 persen menyetujui gerakan Negara Islam Irak dan Suriah. Selain itu, 23,4 persen menyetujui kesiapan untuk berjihad mendirikan khilafah. Penelitian ini melibatkan 1.800 responden di 25 universitas se-Indonesia.

Berita terbaru dari Jakarta, CNN Indonesia menyebutkan bahwa: Orasi yang berisi perlunya Indonesia menerapkan sistem khilafah menggema di tengah massa pengawal pemeriksaan terhadap politikus PAN Amien Rais, di depan Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (10/10). Orator Ricky Fattama melontarkan pernyataan tentang perlunya menerapkan sistem Khilafah Islamiyah di Indonesia. Ricky merupakan Koordinator Aliansi Pemuda dan Mahasiswa 212 yang juga menjadi koordinator lapangan aksi massa mengawal Amien di Polda Metro Jaya.

“Ganti Presiden, Ganti Sistem! Takbir!” Pekik Ricky menggunakan pengeras suara dari atas mobil komando di depan pagar Mapolda Metro Jaya.

“Allahuakbar!” pekik massa.

Ricky menyatakan bahwa Indonesia tidak akan berubah menjadi negara yang kuat jika tidak menerapkan sistem Khilafah Islamiyah. Menurutnya, dengan sistem tersebut, Indonesia dapat mengalahkan Amerika Serikat dan Russia.

“Kita akan luluhlantakkan Amerika. Kita akan hancurkan Rusia. Dan itu tidak mungkin dengan rezim seperti ini. Tidak mungkin dengan dengan sistem seperti ini,” imbuh Ricky.

“Itu hanya bisa gerakkan oleh pemimpin yang merupakan khalifah di dalam naungan sistem khilafah islamiyah. Takbir!” ucap Ricky.

Selanjutny untuk mengetahui pola-pola penyebaran faham radikalisme, dapat diuraikan berdasarkan data sebagai berikut: Berdasarkan hasil diskusi dengan BNPT Direktur Pencegahan, pada tanggal 9 Oktober 2018 diperoleh informasi bahwa: Kodisi intoleran sekarang ini sudah di tanamkan oleh kelompok Radikalisme sejak anak di usia PAUD dengan memperlihatkan

bahwa di Mall tidak boleh karena Mall milik orang kafir dan musuh Islam. Agama Islam sudah di dzolimi oleh orang-orang Cina dan sebagainya.

Dalam konteks Indonesia bahwa awal masuknya radikalisme di Indonesia berawal berdirinya NII/DI/TII. Isu-isu yang dikembangkan kelompok teroris akan selalu berkembang dan mereka akan memanfaatkan momen momen.

- a. Isu perbedaan Sunni Syiah.
- b. Akhir zaman ada imam mahdi.
- c. Uang.
- d. Memperbaiki keturunan.

Dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa kelompok ini melalui berbagai jalur, seperti: Kos-kosan, Masjid, Mentoring, Kampus, asrama, masjid fakultas, dan universitas. Pada awal mulanya doktrin utamanya tidak di perlihatkan, tetapi dengan sesuatu yang seakan-akan pembenaran nanti setelah masuk maka agenda untuk memasukkan ideologinya akan dilakukan dengan halus dan tidak terasa yang akhirnya kita akan mengikuti mereka. Hal inilah yang harus diwaspadai oleh segenap civitas akademika, untuk mengantisipasi dan mencegah berkembangnya paham radikalisme di kampus.

HTI menurut Direktur BNPT melakukan aksinya melalui 3 tahapan, yaitu:

- a. Pemahaman/sosialisasi.
- b. Interaksi dengan masyarakat.
- c. Revolusi.

Saat ini banyak orang-orang HTI yang keluar dan sudah gabung dengan ISIS dan Al Qaeda, karena gerakannya lebih masif dan jelas karena langsung angkat senjata.

Pendapat senada disampaikan oleh Dr. Dadang WD 3 MIPA Unsoed, bahwa: ada salah satu mahasiswa fisika yang mengikuti kegiatan ormas terlarang HTI di Baturraden sehingga untuk mencegah masuknya paham radikal maka dia berkoordinasi dengan WR 3 untuk melakukan pembinaan dan salah satu trobosannya adalah mengubah kegiatan mentoring dengan kegiatan yang lebih mengajarkan Islam yang penuh damai. Di Unsoed ada unsoed mengaji, nusantara mengaji, program ini spiritnya adalah untuk pemahaman kerohanian Islam tetapi tidak dengan mentoring, tetapi dengan

sistem yang berbeda sehingga LDK UKKI bisa menerima itu. Karena unsoed sudah melakukan pelarangan terhadap kegiatan Mentoring karena terindikasi masuk kegiatan yang mengarah pada gerakan radikalisme.

Dapat diambil kesimpulan sementara bahwa pola penanaman faham radikalisme dimulai dari penyebaran pemikiran yang bersifat fanatisme sempit dalam pemahaman terhadap suatu peristiwa, nilai-nilai kehidupan dan pemahaman keagamaan. Setelah itu dilakukan pendekatan intensif melalui kegiatan mentoring, atau kelompok-kelompok kecil, sampai mereka betul-betul yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan dan kelompok mereka adalah kelompok yang paling benar, serta menganggap kelompok yang lain adalah salah atau sesat atau kafir. Baru apabila kondisi ini telah tercipta, maka mulai dimasukkanlah pemahaman dan penanaman faham radikalisme dan pada akhirnya sampai pada melakukan gerakan radikalisme yang pada ujungnya adalah sampai pada timbulnya gerakan terorisme.

1. Strategi pencegahan dan penanggulangan timbulnya faham radikalisme dikalangan mahasiswa dan civitas akademika

Menurut M. Nuh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) saat berbicara pada Forum Rektor Indonesia (FRI), Rabu (29/1) malam di Taman Budaya Jawa Tengah, Surakarta, bahwa Perguruan tinggi mempunyai empat peran dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai supporter (pendukung), sebagai driver, enabler, dan sebagai pemicu transformasi. Menurutnya, peran sebagai supporter (penopang) adalah peran paling bawah dalam hierarki. Sebagai driver perguruan tinggi menggerakkan sekaligus mengarahkan. Sebagai enabler, perguruan tinggi bertugas mendobrak ketidakmungkinan melalui kreativitas dan inovasi. Adapun sebagai pemicu transformasi, perguruan tinggi memulai perubahan transformatif.

“Peran terbaik adalah sebagai pemicu tranformasi, yakni penggerak perubahan. Maka, perguruan tinggi harus bergerak dinamis. Pengajarannya harus berubah, jangan itu-itu saja. Risetnya harus berkembang, jangan itu-itu saja,” lanjut mantan Rektor Insitut Teknologi Surabaya (ITS) itu. Nuh menyampaikan, di antara entitas lain, masyarakat perguruan tinggi adalah yang paling beruntung. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat perguruan tinggi memanjatkan syukur dengan memberikan sumbangan terbaik bagi

bangsa (<https://unnes.ac.id/berita/mendikbud-tugas-perguruan-tinggi-membangun-transformasi/>).

Kekhawatiran sejumlah pemerhati pendidikan tergambar jelas, saat memandang peran perguruan tinggi yang semakin tergerus menyikapi fenomena aksi unjuk rasa besar yang terjadi pada 4 November 2016. Perguruan tinggi di Indonesia yang dalam sejarahnya selalu menjadi motor pergerakan dan konsolidasi sosial politik masyarakat seperti kehilangan kekuatan, sehingga digantikan perannya oleh kelompok organisasi masyarakat dalam mendorong demokrasi.

Hal diatas terungkap dalam sebuah diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dengan tema "Peran Perguruan Tinggi dalam Konsolidasi Politik Berbangsa dan Bernegara" dengan beberapa narasumber antara lain, Sofian Effendi, Azyumardi Azra, Ravik Karsidi dan Fathorrahman Ghufron di Kantor Wantimpres, Jalan Veteran III Jakarta, pada Selasa, (29/11/2016). "Pada 2016, peran kampus sangat menyurut digantikan oleh jaringan majelis taklim masjid di seluruh Jawa, dan peranan beberapa organisasi seperti MUI, HTI, dan FPI. Mengapa peran kampus dalam memelihara konsolidasi demokrasi di Indonesia menunjukkan gejala penurunan pada 2016 ini," ucap Sofian Effendi.

Sedangkan Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Ravik Karsidi mencermati hilangnya mata kuliah wajib seperti Pancasila dan Agama yang menjadi kebijakan sebagian besar perguruan tinggi telah memberikan dampak terkikisnya rasa nasionalisme dan kebangsaan mahasiswa dan lingkungan akademis perguruan tinggi. "Pada masa reformasi, mata kuliah wajib tersebut mulai tergerus, walaupun beberapa pembinaan nasionalisme tetap dilakukan dan beberapa pelatihan dan motivasi kebangsaan tetap dilaksanakan seperti ESQ, AMT dan LKMM," terang Ravik Karsidi.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, mengkritisi kultur dan lingkungan perguruan tinggi yang saat ini dinilai lebih elitis. Orientasi terhadap prestasi dan elitisme itu, memberikan batas dan sekat yang semakin lebar dengan masyarakat, sehingga kecil harapan akan konsolidasi sosial politik muncul dari perguruan tinggi. "Prestasi akademis yang mereka capai, pada gilirannya, juga mendorong munculnya rasa elitisme, yang kemudian memunculkan sikap dan gaya hidup tersendiri, termasuk

dalam kehidupan politik. Semakin terpisah lingkungan PT dari lingkungan masyarakat umumnya, semakin tinggi pula sikap elitisme,” (<https://www.kasn.go.id/details/item/76-mendorong-peran-sosial-politik-perguruan-tinggi>).

Perguruan Tinggi mempunyai peran penting dan strategis dalam menangkal bahaya radikalisme dan intoleransi yang tumbuh di masyarakat. “Mahasiswa diharapkan jadi ujung tombak untuk menangkal tumbuh kembangnya paham radikalisme,” kata Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Prof Dr Iza Fadri usai menjadi pembicara dalam acara Penyambutan Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila di Jakarta, Jumat 3 Maret 2017. Iza Fadri menyampaikan materi bertajuk Peran Institusi Pendidikan Tinggi Dalam Memberikan Kontribusi, Solusi Terhadap Meningkatnya Gejala Intoleransi, Radikalisme, dan Lemahnya Daya Saing Bangsa dihadapan ratusan mahasiswa Pascasarjana. Menurut dia, kepolisian mendorong kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di tanah air. Caranya dengan memberikan edukasi tentang kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berbagai macam perbedaan (Tempo. Co. Jakarta, Sabtu, 4 Maret 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayyie al-Kattani, *Fundamentalisme Dalam Perspektif Barat dan Islam* (Terjemahan), Gema Insani Press, Jakarta, 1999.
- Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tantangan*, Cetakan I, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999.
- Azyumardi Azra, *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme, dan Pluralitas*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2000.
- H.A.R. Gibb, *Aliran-Aliran Moderen Dalam Islam*, Terjemahan Machnun Husein, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Harun Nasution, *Islam Rasional*, Mizan, Bandung, 1995.
- James. M. Henslin, *Social Problems*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, Second Edition, 1990.
- Mohtar Mas'ood et.al (Editor), *Radikalisme Kolektif: Kondisi dan Pemicu*, Penerbit P3PK UGM Cet Kedua, 2001.